



**Judul** : Baleg Bahas Revisi UU Pilkada Di Masa Reses : Ada Kesan Terburu-Buru Politik Terlihat Tegang  
**Tanggal** : Selasa, 24 Oktober 2023  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 8

Baleg Bahas Revisi UU Pilkada Di Masa Reses

# Ada Kesan Terburu-buru, Politik Terlihat Tegang...

**Badan Legislasi (Baleg) DPR tengah menggodog revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Namun, pembahasan revisi ini jadi perdebatan sesama legislator karena dilakukan saat reses DPR.**

WAKIL Ketua Baleg Willy Aditya mengatakan, revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan domain Komisi II DPR. Apalagi, revisi ini dilatarbelakangi munculnya keinginan mempercepat pelaksanaan Pilkada serentak yang semula digelar November, menjadi September.

"Ini memunculkan pertanyaan. Apakah sudah koordinasi dengan Komisi II terkait hal ini, karena mereka juga sedang melakukan proses hal yang sama," tanya Willy dalam Rapat Pleno Penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/10/2023).

Willy mengingatkan, saat ini DPR masih dalam masa reses. Karena itu, akan menjadi

tanda tanya seberapa urgen revisi Undang-Undang Pilkada ini mesti dibahas di luar agenda masa sidang DPR.

"Ada kesan yang bukan hanya terburu-buru, tetapi sangat di-buru-buru. Kita dalam masa reses. Tentu kita, walau politik tegang, tapi kewarasan dalam bertata negara menjadi hal yang sangat krusial sekali," ujar anggota Fraksi NasDem ini.

Hal senada dilontarkan anggota Baleg Herman Khaeron. Dia bisa memahami jika ada urgensi waktu terkait revisi Undang-Undang Pilkada ini. Namun demikian, harus ada kepastian bahwa pemindahan agenda Pilkada menjadi September, usulan siapa.

"Siapa yang mengusulkan Pilkada itu harus dijalankan September ini. (Kita) harus tahu dalam pembahasan ini," tegasnya.

Herman bertanya-tanya, apakah revisi Undang-Undang Pilkada ini memang skala kepentingan DPR atau skala kepentingan Pemerintah. Kalau ini menjadi skala kepentingan Pemerintah, silakan inisiatif revisi itu di Pemerintah. Akan tetapi kalau ini menjadi skala kepentingan DPR, maka seyogyanya pembahasan revisi ini dimulai dari persoalan urgensi tersebut.

"Dengan masa reses, ini dianggap sebagai sangat penting untuk segera dibahas. Saya ingin melihat dari sisi kronologisnya seperti apa, sehingga skala urgensi ini berada di Baleg. Ini yang perlu diterangkan secara formal," jelas anggota Komisi VI DPR ini.

Sementara, anggota Baleg Johan Budi SP mengingatkan, pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada ini tentu saja berbeda antara kepentingan fraksi-fraksi di Baleg dan juga fraksi-fraksi di Komisi II.

Namun, pokok utama dari pembahasan revisi ini apakah DPR setuju pilkada itu dimajukan.

"Ini inisiatif Pemerintah yang kemudian ke publik kita sampaikan itu inisiatif DPR," katanya.

Karena itu, Johan berpendangan, menjadi tidak relevan lagi siapa yang menjadi inisiatif dari Undang-Undang Pilkada ini. Apalagi, inti dari revisi ini lebih kepada pergeseran pelaksanaan Pilkada.

"Tinggal voting saja fraksi mana yang setuju atau tidak. Ini inisiatif Pemerintah kok diambil alih inisiatif DPR. Ini juga bukan hal baru. Sudah beberapa kali terjadi. Pemerintah nitip tapi karena ada gejolak di publik diambilalihlah inisiatif itu di DPR," tambah dia.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas memastikan, Pimpinan Baleg telah menyurat kepada Pimpinan DPR terkait permohonan izin untuk melakukan rapat di masa reses dan hal ini telah mendapat persetujuan Pimpinan DPR.

Begitu juga terkait pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada, pihaknya telah berkomunikasi dengan Pimpinan DPR.

"Karena undang-undang ini

dianggap sangat mendesak, menyangkut waktu. Tapi kalau ini disepakati, jadwal pilkada yang tadinya di Undang-Undang Pilkada pada November, rencananya dimajukan menjadi September," terang Supratman.

Adapun pertimbangan untuk membahas revisi ini di masa reses, sambungnya, kalau seluruh fraksi sepakat Pilkada dimajukan ke September, maka harus segera merevisi UU Pilkada.

"Seluruh materi muatan yang ada dalam draf ini adalah materi yang sudah dan telah disepakati teman-teman Komisi II," terangnya.

Kenapa Baleg menginisiasi ini, sambung anggota Fraksi Gerindra ini, pertama, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Pimpinan DPR dan Pimpinan Komisi II DPR. Alasannya sangat singkat dan jelas. Kalau Komisi II yang ini maka tahapannya akan menjadi dua.

"Karena pada awalnya nanti penyusunan di Komisi II. Tapi pada akhirnya kita lakukan harmonisasi di Baleg," katanya. ■ KAL